



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



#bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

# 2022

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022  
Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG**  
Jl. TMP Taruna No.7 Tangerang  
Profesional - Responsif - Integritass  
- Mandiri - Akuntabel

[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus selama tahun 2022 kepada publik. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami susun ini memuat tentang keadaan perkara tahun 2022, pelaksanaan kegiatan pengawasan internal serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan yang meliputi : sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi serta regulasi ditahun 2022.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus selama tahun 2022. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di masa yang akan datang.

Tangerang, 09 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



BARITA SINAGA, SH., MH.

NIP. 19581111 199212 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA -----	3
B. PENYELESAIAN PERKARA -----	3
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus -----	4
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu -----	4
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan -----	5
Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK -----	
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi -----	5
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi -----	6
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU -----	6
1. Posbakum -----	6
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu -----	7
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) -----	7
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA -----	9
A. Sumber Daya Manusia -----	9
1. Mutasi -----	26
2. Promosi -----	29
3. Pensiun -----	30
4. Diklat -----	31
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA -----	43
A. Pengelolaan Keuangan -----	43

	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana -----	43
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi -----	55
	1. Implementasi E-Court-----	55
	2. Implementasi SIPP -----	57
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK-----	60
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu -----	60
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) -----	64
	3. Inovasi Pelayanan Publik -----	67
BAB VI	PENGAWASAN -----	74
	A. Internal -----	74
	B. Evaluasi -----	77
BAB VII	PENUTUP -----	78
	A. Kesimpulan-----	78
	B. Rekomendasi -----	79

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Keadaan Perkara Tahun 2022 -----	3
Tabel 2 Sisa Perkara Yang Diputus -----	4
Tabel 3 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu -----	4
Tabel 4 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum -----	5
Tabel 5 Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi-----	5
Tabel 6 Perkara Anak Yang Berhasil melalui Diversi-----	6
Tabel 7 Realisasi Anggaran Posbakum -----	7
Tabel 8 Realisasi Anggaran Perkara Prodeo-----	7
Tabel 9 Rekapitulasi Perkara Prodeo -----	8
Tabel 10 Profil Sumber Daya Manusia -----	10
Tabel 11 Komposisi SDM-----	26
Tabel 12 Mutasi Masuk Alih Tugas-----	27
Tabel 13 Mutasi Keluar Alih Tugas -----	28
Tabel 14 Promosi-----	30
Tabel 15 Daftar Pegawai Pensiun -----	30
Tabel 16 Diklat SDM (Teknis/Non Teknis)-----	31
Tabel 17 Rekapitulasi Belanja Pegawai-----	43
Tabel 18 Realisasi Belanja Pegawai-----	43
Tabel 19 Rekapitulasi Belanja Barang-----	44
Tabel 20 Realisasi Belanja Barang-----	44
Tabel 21 Rekapitulasi Belanja Modal -----	46
Tabel 22 Realisasi Belanja Modal -----	46
Tabel 23 Realisasi Belanja Barang Dipa 03-----	46
Tabel 24 Rekapitulasi PNBPN-----	47

Tabel 25	Kendaraan Dinas-----	49
Tabel 26	Rumah Dinas-----	50
Tabel 27	Sarana dan Prasarana-----	51
Tabel 28	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran-----	53
Tabel 29	Akun E-Court-----	57
Tabel 30	Perkara Perdata Melalui E-Court-----	57
Tabel 31	Perangkat Keras-----	58
Tabel 32	Perangkat Lunak-----	59
Tabel 33	Hakim Pengawas Bidang PN Tangerang-----	75





# BAB I PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dalam Pasal 50 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten di mana daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan peradilan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengacu pada kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menaunginya.

Salah satu kebijakan peradilan yang mendasar untuk merespon ekspektasi masyarakat yang menginginkan lembaga peradilan yang agung sebagaimana tersebut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya adalah menyatukan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI pada tahun 2004.

Selain itu, diterbitkan juga cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak biru pembaruan pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dalam cetak biru ini dituangkan

usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Modernisasi Peradilan dengan berbasis TI (Teknologi Informasi) terpadu.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan





# BAB II KEADAAN PERKARA

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS

Keadaan perkara di tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Keadaan Perkara tahun 2022**

	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara tahun 2022	Persentase Penyelesaian Perkara tahun 2022
Pidana	Biasa	329	2.243	1787	785	79.67%
	Cepat	0	81.041	81.041	0	100%
	Anak	1	135	134	2	99.26%
	Pra Peradilan	0	14	12	0	85.71%
Perdata	Gugatan	590	1.360	1.381	569	70.82%
	Permohonan	78	1.351	1.328	101	92.93%
	Gugatan Sederhana	16	79	76	19	80%
	Perlawanan/Bantahan	17	21	23	15	60.53%

#### B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS

##### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tahun 2022.

**Tabel 2**  
**Sisa Perkara Yang Diputus**

Perkara		Sisa Perkara tahun 2021	Sisa Perkara tahun 2021 Yang diputus pada tahun 2022	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
Pidana	Biasa	329	329	100%
	Cepat	0	0	0%
	Anak	1	1	100%
	Pra Peradilan	0	0	0%
Perdata	Gugatan	590	590	100%
	Permohonan	78	78	100%
	Gugatan Sederhana	16	16	100%
	Perlawanan/Bantahan	17	17	100%

**2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

Berikut ini rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tahun 2022.

**Tabel 3**  
**Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Perkara		Jumlah Perkara Putus tahun 2022	Jumlah Perkara diputus tepat waktu	Jumlah perkara diputus tidak tepat waktu	Persentase Penyelesaian perkara diputus tepat waktu
Pidana	Biasa	1.787	1.767	20	98.8%
	Cepat	81.041	81.041	0	100%
	Anak	134	134	0	100%
	Pra Peradilan	12	12	0	100%
Perdata	Gugatan	1.381	850	531	61.54%
	Permohonan	1.328	1327	1	99.92%
	Gugatan Sederhana	76	76	0	100%

	<b>Perlawanan /bantahan</b>	23	23	0	100%
--	-----------------------------	----	----	---	------

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tahun 2022.

**Tabel 4**

**Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

No	Perkara	Jumlah Perkara Putus tahun 2022	Jumlah Perkara Putus th 2022 tidak mengajukan banding		Jumlah Perkara Putus th 2022 tidak mengajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus th 2022 tidak mengajukan PK	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Pidana Biasa	1.787	1.708	95.95%	1718	96.46%	1778	99.54%
2	Pidana Anak	134	128	95.04%	134	100%	134	100%
3	Perdata Gugatan	1.381	1.143	82.77%	1.223	88.55%	1.348	97.33%

### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi**

Jumlah Perkara Perdata Yang Dimediasi di Th 2022	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1.833	57	582	1.194	0

## 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tahun 2022:

**Tabel 6**  
**Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**

Jumlah Perkara Pidana Anak th 2022	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Didiversi th 2022	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
135	92	5	87	0	0

## C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

### 1. POSBAKUM

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di mana Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Pengadilan harus menyediakan akses bagi **terdakwa** yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan. Sebanyak 1.050 perkara yang mendapatkan Pelayanan Posbakum pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

**Tabel 7**  
**Realisasi Anggaran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Tahun 2022**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	33.600.000	33.600.000	100%

## 2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk Membantu menangani kendala tersebut, ditetapkanlah program Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

**Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2022 tidak ada melaksanakan sidang keliling / sidang di luar Gedung dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.**

## 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014, fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pada tahun 2022 jumlah anggaran perkara prodeo adalah Rp. 2.760.000,00, untuk realisasinya adalah sebesar Rp.540.000, jumlah perkara prodeo yang selesaikan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai berikut.

**Tabel 8**  
**Realisasi Anggaran Perkara Prodeo Tahun 2022**

No	Jumlah Perkara yang diberikan pembebasan biaya	Jumlah perkara yang diterima	Putus	Sisa
1	3	3	3	0

**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Jumlah Perkara Prodeo**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH PERKARA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Januari	2	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	1	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-



# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA



# BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA

### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

#### 1. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Tangerang kelas IA Khusus adalah salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara yang berasal dari wilayah hukumnya yaitu: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Begitu luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang kelas IA Khusus sehingga untuk menangani perkara dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, efisien dan biaya ringan memerlukan personil atau sumber daya manusia yang mempunyai kuantitas memadai serta kualitas yang baik.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mempunyai Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- Ketua	= 1 orang
- Wakil Ketua	= 1 orang
- Hakim	= 30 orang
- Panitera	= 1 orang
- Sekretaris	= 1 orang
- Kabag Umum	= 1 orang
- Panitera Muda	= 3 orang
- Kasub. Bag	= 3 orang
- Panitera Pengganti	= 36 orang
- Jusrisita/ Jusrisita Pengganti	= 26 orang
- Pelaksana	= 21 orang
Jumlah	= 124 orang

Berikut ini tabel profil sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus**

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barita Sinaga, S.H., M.H. 195811111992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00010/KEP/AA/150 01/21	Ketua	2022-02- 25	67/KMA/SK/II/202 2	S-2
2	Khamim Thohari, S.H., M.Hum. 196712031992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00020/KEP/AA/150 01/21	Wakil Ketua	2022-04- 06	67/KMA/SK/II/202 2	S-2
3	Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. 195804061982031003	Pembina Utama Madya IV/d	2017-10-01	00072/KEP/AA/150 01/17	Hakim	2021-05- 04	1344/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2
4	Kamaruddin Simanjuntak, S.H. 195712031985121001	Pembina Utama Madya IV/d	2014-04-01	64/K TAHUN 2014	Hakim	2017-08- 10	1144/DJU/SK/KP. 04.5/5/2017	S-1
5	Bestman Simarmata, S.H., 195810261986121001	Pembina Utama Madya IV/d	2015-04-01	00367/KEP/AA/130 01/15	Hakim	2020-04- 16	18/DJU/SK/KP04. 5/1/2020	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Agus Iskandar, S.H., M.H. 195808291988031001	Pembina Utama Madya IV/d	2016-04-01	00300/KEP/AA/130 01/16	Hakim	2020-08- 03	702/DJU/SK/KP0 4.5/6/2020	S-2
7	Sih Yuliarti, S.H. 196307091988032003	Pembina Utama Madya IV/d	2016-10-01	00616/KEP/AA/130 01/16	Hakim	2020-12- 17	1690/DJU/SK/KP 04.5/12/2020	S-1
8	Nanik Handayani, S.H., M.H. 196903081990032002	Pembina Utama Madya IV/d	2021-10-01	00077/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2020-08- 03	614/DJU/SK/KP0 4.5/4/2020	S-2
9	Lucky Rombot Kalalo, S.H. 196702031992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-10-01	00097/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2021-11- 02	1769/DJU/SK/KP. 04.5/9/2021	S-1
10	Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. 196905041992032003	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00014/KEP/AA/150 01/22	Hakim	2021-05- 04	1344/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2
11	Saidin Bagariang, S.H. 196112271992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00010/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2022-01- 21	27/KMA/SK/I/202 2	S-1
12	Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum. 196103271992031001	Pembina Utama Madya IV/d	2020-10-01	00080/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2022-03- 07	27/KMA/SK/I/202 2	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Tongam Oase Christian H. Simanjuntak, S.H., M.Hum. 196603011992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00020/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2022-05- 17	149/KMA/SK/V/20 22	S-2
14	Agung Suhendro, S.H., M.H. 196308231992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-10-01	00077/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2021-09- 27	1428/DJU/SK/KP 02.2/7/2021	S-2
15	Rustiyono, S.H., M.Hum. 196703251992121001	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00010/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2021-09- 14	1769/DJU/SK/KP. 04.5/9/2021	S-2
16	Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. 196701211993032002	Pembina Utama Madya IV/d	2021-04-01	00020/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2022-03- 01	27/KMA/SK/I/202 2	S-2
17	Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. 196802051992031003	Pembina Utama Muda IV/c	2020-10-01	00071/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2019-06- 25	1156/DJU/SK/KP 04.5/4/2019	S-2
18	Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. 197102081995031001	Pembina Utama Muda IV/c	2022-04-01	00014/KEP/AA/150 01/22	Hakim	2022-05- 17	149/KMA/SK/V/20 22	S-2
19	Elly Istianawati, S.H., M.H. 197112281996032005	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00023/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2018-03- 23	41/DJU/SK/KP04. 5/02/2018	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Subchi Eko Putro, S.H., M.H. 196903201996031002	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00023/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2020-03- 23	18/DJU/SK/KP04. 5/1/2020	S-2
21	Wadji Pramono, S.H., M.H. 196904181996031001	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00005/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2022-05- 17	149/KMA/SK/V/20 22	S-2
22	Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. 196410091996031002	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00014/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2019-06- 17	1156/DJU/SK/KP 04.5/4/2019	S-2
23	R. Aji Suryo, S.H., M.H. 196904071996031005	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00023/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2019-06- 24	1156/DJU/SK/KP. 04.5/4/2019	S-2
24	Edy Toto Purba, S.H., M.H. 197001311996031002	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00014/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2021-05- 04	1344/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2
25	Fathul Mujib, S.H., M.H. 196209081996031001	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00023/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2021-05- 21	1344/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2
26	Arif Budi Cahyono, S.H. 197001261996031003	Pembina Utama Muda IV/c	2020-04-01	00014/KEP/AA/150 01/20	Hakim	2019-06- 21	1156/ DJU/ SK/ KP04.5/ 4/ 2019	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. 196705051997031005	Pembina Utama Muda IV/c	2021-04-01	00033/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2021-09- 14	1769/DJU/SK/KP. 04.5/9/2021	S-2
28	Masduki, S.H. 197102011999031001	Pembina Utama Muda IV/c	2022-04-01	00014/KEP/AA/150 01/22	Hakim	2022-05- 17	149/KMA/SK/V/20 22	S-1
29	Ismail Hidayat, S.H.,M.H. 197310101999031005	Pembina Utama Muda IV/c	2021-10-01	00086/KEP/AA/150 01/21	Hakim	2021-09- 14	1769/DJU/SK/KP. 04.5/9/2021	S-2
30	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. 197411212000122002	Pembina Tingkat I IV/b	2021-04-01	1214/DJU/SK/KP04 .1/4/2021	Hakim	2022-04- 13	67/KMA/SK/II/202 2	S-2
31	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. 197811091998031002	Pembina Tingkat I IV/b	2021-04-01	241/SEK/Kp.I/SK/III /2021	Sekretaris	2022-03- 23	367/SEK/Kp.I/SK/ III/2022	S-2
32	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. 197309081994032003	Pembina Tingkat I IV/b	2019-04-01	1214/DJU/SK/KP.0 4.1/4/2019	Panitera	2021-02- 01	1589/DJU/SK/KP. 04.5/10/2020	S-3
33	Dessy Herliani, S.Sos. 197912122006042002	Pembina IV/a	2021-10-01	899/SEK/Kp.I/SK/IX /2021	Kepala Bagian Umum	2018-07- 27	240/SEK/Kp.I/SK/ V2018	S-1
34	Endang Purwaningsih, S.H., M.H. 196811061988032002	Pembina IV/a	2013-10-01	575/DJU2/SK/KP04 .1/IX/2013	Panitera Muda Perdata	2021-10- 04	2008/DJU/SK/KP. 04.5/10/2021	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Marthin Turnip, S.H., M.H. 198203262001121001	Pembina IV/a	2022-04-01	170/DJU/KP.04.1/5/ 2022	Panitera Muda Hukum	2019-03- 22	24/DJU/SK/KP.04 .5/1/2019	S-2
36	M. Taufik, S.H., M.H. 198111102003121002	Pembina IV/a	2022-04-01	166/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Panitera Muda Pidana	2018-08- 13	1620/DJU/SK/KP. 04.5/8/2018	S-2
37	Denhar, S.H., M.H. 196512241991031003	Pembina IV/a	2017-10-01	150A/SEK/Kp.I/SK/ VIII/2017	Ka Sub Bagiann Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	2019-05- 14	354/SEK/Kp.I/SK/ V/2019	S-2
38	Rachmat Budiyanto, 196806261993031004	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	W29.U/40/KPT/SK/ KP.04.1/IV/2019	Ka Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	2015-12- 23	37/SEK/Peng.06. 1/12/2015	SLTA/SEDE RAJAT
39	Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H. 198108022006041002	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W29.U/35/KPT/SK/ KP.04.1/III/2021	Ka Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan	2018-07- 27	240/SEK/Kp.I/SK/ V/2018	S-2
40	Wiji Astuti, S.H., M.H. 196708041986102001	Pembina IV/a	2017-10-01	1742/DJU/SK/KP.0 4.1/11/2017	Panitera Pengganti	2022-10- 27	2443/DJU/SK/KP 04.5/10/2022	S-2
41	Yetti, S.H., M.H. 196701231992062001	Pembina IV/a	2012-10-01	727/DJU/SK/KP 04.1/X/2012	Panitera Pengganti	2021-05- 18	1353/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Ikut, S.H., M.H. 196907051992031004	Pembina IV/a	2020-10-01	1258/DJU/SK/KP04 .1/10/2020	Panitera Pengganti	2012-11- 14	50/DJU/SK/Kp 04.6/X/2012	S-2
43	Irwan Bayumi, S.H., M.H. 197012071992031002	Pembina IV/a	2011-10-01	764/DJU/SK/KP.04. 1/XI/2011	Panitera Pengganti	2017-06- 05	87/DJU/SK/KP.04 .5/3/2017	S-2
44	Maria Theresia Retno Sekarwati, S.H., M.H. 196304301993032001	Pembina IV/a	2012-10-01	587/DJU/SK/KP 04.1/X/2012	Panitera Pengganti	2014-08- 25	11/DJU/KP04.5/4/ 2014	S-2
45	Nunyati, S.H., M.H. 197510151999042001	Pembina IV/a	2022-04-01	322/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Panitera Pengganti	2021-06- 21	1351/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-2
46	Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. 197811132002031001	Pembina IV/a	2021-04-01	228/SEK/Kp.I/SK/III /2021	Panitera Pengganti	2022-04- 18	128/KMA/SK/IV/2 022	S-2
47	Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H. 198005112002122002	Pembina IV/a	2022-04-01	324/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Panitera Pengganti	2017-10- 02	1212/DJU/SK/KP 04.5/7/2017	S-2
48	Aida Sarasti, S.H. 196303131983032001	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	1416/DJU/SK/KP.0 4.1/9/2016	Panitera Pengganti	2009-07- 27	120/DJU/SK/PP/V I/2009	S-1
49	Sukiman, S.H. 196306261985011001	Penata Tingkat I III/d	2013-04-01	279/DJU/SK/KP 04.1/V/2013	Panitera Pengganti	1997-10- 04	D.4.424.Kp.04.12. 97	S-1
50	Puji Sulistaryo, S.H. 196807061990031006	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	1312/DJU/SK/KP.0 4.1/8/2016	Panitera Pengganti	2017-01- 03	1616/DJU/SK/KP. 04.5/10/2016	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Susmiyati, S.H. 197007011992032002	Penata Tingkat I III/d	2019-10-01	2672/DJU/SK/KP.0 4.1/8/2019	Panitera Pengganti	2011-10- 05	46/DJU/SK/KP05. 6/V/2011	S-1
52	Tuti Wildhani, S.H. 196508181994032002	Penata Tingkat I III/d	2006-04-01	882/SK/DIRJEN- X/D.1/KP.PP/05/06	Panitera Pengganti	2020-04- 29	32/dju/sk/kp.04.5/I /2020	S-1
53	Ari Prasetyo, S.H. 197201221994031004	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	318/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Panitera Pengganti	2016-10- 17	1631/DJU/SK/KP 04.5/10/2016	S-1
54	Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H. 197207221994031002	Penata Tingkat I III/d	2019-08-26	2673/DJU/SK/KP.0 4.1/8/2019	Panitera Pengganti	2012-08- 02	37/DJU/SK/KP.04 .6/VII/2012	S-1
55	Nunung Nurfika, S.H., M.H. 196903301996032003	Penata Tingkat I III/d	2017-04-01	1085/DJU/SK/KP.0 4.1/4/2017	Panitera Pengganti	2009-10- 08	154/DJU/SK/KP.0 4.6/PP/IX/2009	S-2
56	Hera Amalia Nohara, S.H. 197010051998032002	Penata Tingkat I III/d	2017-10-01	2086/DJU/SK/KP.0 4.1/11/2017	Panitera Pengganti	2009-10- 08	154/DJU/SK/Kp.0 4.6/PP/IX/2009	S-1
57	Zelfi Rahmadiani, S.H. 197409261999032002	Penata Tingkat I III/d	2011-04-01	291/DJU/SK/KP.04. 1/IV/2011	Panitera Pengganti	2016-04- 25	891/DJU/SK/KP0 4.5/5/2016	S-1
58	Eva Ruzana, S.H. 197308311999032005	Penata Tingkat I III/d	2018-04-01	935/DJU/SK/KP.04. 1/4/2018	Panitera Pengganti	2017-10- 23	1212/DJU/SK/KP. 04.5/7/2017	S-2
59	Dini Yuli Rosmawati, S.H. 197307291999032002	Penata Tingkat I III/d	2011-04-01	273/DJU/SK/KP.04. 1/IV/2011	Panitera Pengganti	2017-05- 22	87/DJU/SK/KP.04 .5/3/2017	S-1
60	Tati Doresly Simamora, S.H. 196510102000032001	Penata Tingkat I III/d	2012-04-01	395/DJU/SK/KP 04.1/VI/2012	Panitera Pengganti	2019-10- 21	2636/DJU/SK/KP. 04.5/8/2019	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Nova Vitrianida, S.H. 197811262000032001	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	971/DJU/SK/KP.04. 1/2/2019	Panitera Pengganti	2022-02- 14	52/KMA/SK/II/202 2	S-1
62	Santi Indah Pratiwi, S.H. 197801232001122002	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	112/DJU2/SK/KP.0 4.1/III/2014	Panitera Pengganti	2015-07- 01	622/DJU/SK/KP0 4.5/4/2015	S-1
63	Yuris Dhetiawan, S.H., M.H. 198206042001121001	Penata Tingkat I III/d	2017-10-01	2065/DJU/SK/KP.0 4..1/11/2017	Panitera Pengganti	2021-10- 08	2024/DJU/SK/KP. 04.5/10/2021	S-1
64	Wasiatul Chairy, S.H., M.H. 197002192001122001	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	53/DJU.2/SK/KP04. 1/III/2014	Panitera Pengganti	2010-02- 15	12/DJU/SK/KP04. 5/2010	S-2
65	Anita Rahmawati, S.H. 197908022002122004	Penata Tingkat I III/d	2015-04-01	703/DJU/SK/KP04. 1/4/2015	Panitera Pengganti	2021-05- 18	1353/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-1
66	Ahadi Budiarto, S.H. 197711272003121004	Penata Tingkat I III/d	2018-04-01	1359/DJU/SK/KP.0 4.1/5/2018	Panitera Pengganti	2016-04- 25	876/DJU/SK/KP0 4.5/5/2016	S-1
67	Martin Octavianus, S.H., M.H. 198210252008051001	Penata Tingkat I III/d	2020-10-01	1465/DJU/SK/KP04 .1/10/2020	Panitera Pengganti	2022-02- 14	51/KMA/SK/II/202 2	S-2
68	Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H. 198504182009122007	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	323/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Panitera Pengganti	2018-08- 14	1636/DJU/SK/KP 04.5/8/2018	S-2
69	Hilman Syahadat, S.T., S.H. 197506102009041002	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	631/DJU/SK/KP.04. 1/3/2021	Panitera Pengganti	2021-11- 01	2024/DJU/SK/KP. 04.5/10/2021	S-1
70	Syahrir, S.H., M.H. 198306122005021001	Penata III/c	2020-04-01	293/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Panitera Pengganti	2015-12- 02	1670/DJU/SK/KP 04.5/10/2015	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Sri Hartini, S.E., M.H. 197803292006042001	Penata III/c	2019-04-01	726/DJU/SK/KP.04. 1/2/2019	Panitera Pengganti	2018-02- 05	2224/DJU/SK/KP 04.5/12/2017	S-2
72	Erik Yuswanto, S.H. 198204262007041001	Penata III/c	2020-04-01	295/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Panitera Pengganti	2016-04- 25	876/DJU/SK/KP0 4.5/5/2016	S-1
73	Minati Indriani, S.H. 198503252008052001	Penata III/c	2020-10-01	1299/DJU/SK/KP04 .1/10/2020	Panitera Pengganti	2020-03- 09	32/DJU/SK/ KP.04.5/1/2020	S-2
74	Lia Marlia, S.H. 198203102009042004	Penata III/c	2020-04-01	294/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Panitera Pengganti	2019-08- 12	2495/DJU/SK/KP. 04.5/7/2019	S-2
75	Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H. 198208182012122001	Penata III/c	2019-10-01	W10- U/99/KP.00.3/10/20 19	Panitera Pengganti	2021-07- 01	1353/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-3
76	Muhamad Toufan Putra Pratama, S.E. 198610172009041003	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W29.U/51/KPT/SK/ KP.04.1/III/2021	Pranata Keuangan APBN Penyelia	2021-04- 01	283/SEK/Kp.I/SK/ IV/2021	S-1
77	Ambo Adi Manggaukang, S.H. 197110121993031003	Penata III/c	2021-10-01	1483/DJU/SK/KP.0 4.1/8/2021	Juru Sita	2021-05- 18	1353/DJU/SK/KP 04.5/5/2021	S-1
78	Iwan Taruna, S.H. 198012132006041005	Penata III/c	2020-04-01	429/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Juru Sita	2014-10- 01	66/DJU.2/SK/KP 04.5/8/2014	S-1
79	Miskah, S.H. 197405062006041002	Penata III/c	2020-04-01	432/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Juru Sita	2021-11- 01	2024/DJU/SK/KP. 04.5/10/2021	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Burhanuddin, 196704301989031005	Penata Muda Tingkat I III/b	2013-04-01	367/DJU/SK/KP 04.1/VI/2013	Juru Sita	2018-08- 18	1571/DJU/SK/KP 04.5/7/2018	SLTA/SEDE RAJAT
81	Dedy Purwanto, S.H. 198612062009121006	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	969/DJU/SK/KP.04. 1/2/2019	Juru Sita	2022-10- 27	2444/DJU/SK/KP 04.5/10/2022	S-1
82	Azmilena, S.H. 196612271991032005	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	970/DJU/SK/KP.04. 1/2/2019	Juru Sita Pengganti	2015-04- 16	W29.U4/208/KP.0 4.12/IV/2015	S-1
83	Tri Widiati, 196705161992032002	Penata Tingkat I III/d	2020-04-01	460/DJU/SK/Kp.04. 1/3/2020	Juru Sita Pengganti	2017-12- 28	W29.U4/877/KP.0 4.12/12/2017	S-1
84	Chuzamiah, S.H. 197007251993032004	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	524/DJU/SK/KP04. 1/3/2021	Juru Sita Pengganti	1999-04- 01	W8.DE.01.KP.04. 12.98	S-1
85	Sarimanah, S.H. 196606051998032002	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	539/DJU/SK/KP04. 1/3/2021	Juru Sita Pengganti	2009-09- 08	W29.U4/2137/KP. 04.12/IX/2009	S-1
86	Euis Hastuti Alawiah, S.Sos. 197201082006042001	Penata Tingkat I III/d	2018-04-01	1054/DJU/SK/KP.0 4.1/5/2018	Juru Sita Pengganti	2015-04- 16	W29.U4/208/KP.0 4.12/IV/2015	S-1
87	Ashar Abdi, S.H. 197506062008051001	Penata Tingkat I III/d	2022-10-01	W29.U/96/KPT/SK/ KP.04.1/X/2022	Juru Sita Pengganti	2022-09- 29	W29.U4/1118/KP. 04.6/9/2022	S-1
88	Rudi Dwi Kurniawan, S.T. 198512292008051001	Penata Tingkat I III/d	2022-10-01	2309/DJU/SK/KP04 .1/9/2022	Juru Sita Pengganti	2021-08- 18	W29.U4/703/KP.0 4.6/8/2021	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Winny Yoanda Walujo, S.E., M.H. 197704152009042002	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	538/DJU/SK/KP.04. 1/3/2021	Juru Sita Pengganti	2014-05- 20	W29.U4/2062/KP. 04.12/V/2014	S-2
90	Lestari Novida Gustiah, 196511171986032005	Penata III/c	2021-10-01	1487/DJU/SK/KP.0 4.1/8/2021	Juru Sita Pengganti	2009-09- 08	W29.U4/2137/KP. 04.12/IX/2009	S-1
91	Sudargo Hartono, A.Md. 197805072003121004	Penata III/c	2020-04-01	470/DJU/SK/KP.04. 1/3/2020	Juru Sita Pengganti	2010-05- 07	W29.U4/136/Kp.0 4.12/V/2010	D-III
92	Diana Wahyuningsih, S.H. 198905022009042001	Penata III/c	2022-10-01	2326/DJU/SK/KP.0 4.1/9/2022	Juru Sita Pengganti	2020-09- 02	W29.U4/788/Kp.1 0.10/08/2020	S-1
93	Maryatul Qubro, 196804181989032001	Penata Muda Tingkat I III/b	2009-04-01	W29- U/20/SK/KP/IV/200 9	Juru Sita Pengganti	1998-02- 28	W8.DE- 01.KP.04.12.98	SLTA/SEDE RAJAT
94	Didi Suhendi, 196710161991031003	Penata Muda Tingkat I III/b	2011-04-01	W29.U/22/KPT/SK/ KP/III/2011	Juru Sita Pengganti	2005-07- 12	W29.DE.KP.04.12 -03.Th2005	SLTA/SEDE RAJAT
95	Subagyo, 196912221992031003	Penata Muda Tingkat I III/b	2012-04-01	W29.U/29/KPT/SK/ KP/IV/2012	Juru Sita Pengganti	2012-02- 06	W29.U4/98/KP.04 .12/II/2012	SLTA/SEDE RAJAT
96	Eni Wijayanti, 197005261993032001	Penata Muda Tingkat I III/b	2013-04-01	W29.U/36/KPT/SK/ KP.04.05/III/2013	Juru Sita Pengganti	2009-09- 08	W29.U4/2137/KP. 04.12/IX/2009	SLTA/SEDE RAJAT

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Ayu Anisa Septiningrum, A.Md. 198409242009042012	Penata Muda Tingkat I III/b	2021-04-01	566/DJU/SK/KP04. 1/3/2021	Juru Sita Pengganti	2017-05- 26	W29.U4/340/KP.0 4.12/V/2017	D-III
98	Priska Rufina Sianturi, S.E. 198501022015032002	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	W29.U/18/KPT/SK/ KP.04.1/II/2019	Juru Sita Pengganti	2022-05- 18	W29.U4/540/KP.0 4.6/5/2022	S-1
99	Adhi Firzia Mihram, 198510042003121001	Penata Muda III/a	2021-04-01	570/DJU/SK/KP04. 1/3/2021	Juru Sita Pengganti	2020-09- 02	W29.U4/788/KP.1 0.10/08/2020	SLTA/SEDE RAJAT
100	Hapid, 197201052006041003	Penata Muda III/a	2022-04-01	320/DJU/SK/KP.04. 1/5/2022	Juru Sita Pengganti	2009-09- 01	W29.U4/2137/KP. 04.12/IX/2009	SLTA/SEDE RAJAT
101	Muliyadi, 196503021993031006	Pengatur II/c	2011-04-01	W29.U/18/KPT/SK/ KP/III/2011	Juru Sita Pengganti	2009-09- 08	W29.U4/1684/KP. 04.12/VI/2009	SLTP/SEDE RAJAT
102	Alicia Tri Wardhani, S.H. 197803042001122001	Penata Tingkat I III/d	2018-04-01	W29.U/26/KPT/SK/ KP.04.1/IV/2018	Analisis Perkara Peradilan	2022-10- 11	W29.U/104/KPT/ SK/KP.04.6/VI/20 22	S-1
103	Ike Rustiati, S.H. 198101012002122003	Penata Tingkat I III/d	2020-04-01	W29.U/13/KPT/SK/ KP.04.1/II/2020	Analisis Tata Laksana	2022-06- 23	W29.U/56/KPT/S K/KP.04.6/VI/202 2	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. 198209152006042005	Penata Tingkat I III/d	2018-04-01	W1-TUN/KT- 18/KP.04.1/5/2018	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2022-06- 02	W29.U/40/KPT/S K/KP.04.6/V/2022	S-2
105	Peni Juniska Situngkir, S.H., M.H. 198504242008052001	Penata Tingkat I III/d	2020-10-01	124/KPT/SK/KP.04. 1/11/2020	Analisis Perkara Peradilan	2022-11- 01	W29.U/104/KPT/ SK/KP.04.6/VI/20 22	S-2
106	Yusuf Susanto, S.E., S.H. 198101092009041002	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W29.U/41/KPT/SK/ KP.04.1/III/2021	Analisis Perkara Peradilan	2021-05- 21	W29.U/67/KPT/S K/KP.04.6/V/2021	S-1
107	Henny Fitria, S.E. 197906252006042001	Penata III/c	2015-04-01	W- 27.A/1161/KP.04.1/ V/2015	Pengadministra si Registrasi Perkara	2022-06- 02	W29.U/40/KPT/S K/KP.04.6/V/2022	S-1
108	Nirmalia Anggraini, S.H. 198402122009042008	Penata III/c	2017-04-01	836/DJU/SK/KP.04. 1/4/2017	Bendahara	2020-06- 12	W29.U/53/KPT/S K/KP.04.6/VI/202 0	S-1
109	Novy Prihastuti, S.H. 198411082009042007	Penata III/c	2022-10-01	W29.U/95/KPT/SK/ 04.1/X/2022	Analisis Organisasi	2020-09- 17	W29.U/93/KPT/S K/KP.04.6/IX/202 0	S-1
110	Dewi Martiani Wulansari, S.H. 198803312010122002	Penata III/c	2019-04-01	20/SET/KP.04.02/0 4/2019	Analisis Tata Laksana	2022-09- 01	996/SEK/Kp.I/SK/ VII/2022	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Nunung Purwanti, 196508071988032001	Penata Muda Tingkat I III/b	2008-04-01	W29- U/496/KP.04.05/III/ 2008	Pengelola Perkara	2021-09- 02	W29.U/102/KPT/ SK/KP.04.6/IX/20 21	SLTA/SEDE RAJAT
112	Nasrulloh, S.H. 197608092009121002	Penata Muda Tingkat I III/b	2021-04-01	W29.U/52/KPT/SK/ KP.04.1/III/2021	Analisis Hukum	2021-09- 02	W29.U/102/KPT/ SK/KP.04.6/IX/20 21	S-1
113	Dhesga Selano Margen, S.H. 198411252009041004	Penata Muda Tingkat I III/b	2018-04-01	960/DJU/SK/KP.04. 1/4/2018	Pengadministra si Umum	2021-09- 02	W29.U/102/KPT/ SK/KP.04.6/IX/20 21	S-1
114	Frezi Widianingsih, S.H. 199203272015032001	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	W29.U/13/KPT/SK/ KP.04.1/II/2019	Penyusun Laporan Keuangan	2020-09- 17	W29.U/93/KPT/S K/KP.04.6/IX/202 0	S-1
115	Muali Subah, 197207252014081001	Penata Muda III/a	2022-10-01	W29.U/106/KPT/SK /KP.04.1/10/2022	Pengelola Perkara	2021-09- 02	W29.U/102/KPT/ SK/KP.04.6/IX/20 21	S-1
116	Elfriede, S.E. 199506132019032010	Penata Muda III/a	2019-03-01	206/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2019	Penyusun Laporan Keuangan	2022-02- 09	204/SEK/Kp.I/SK/ II/2022	S-1
117	Maya Kartika Laksmiwati, S.E. 199505212020122022	Penata Muda III/a	2020-12-01	1990/SEK/CPNS.0 4.1/SK/XII/2020	Verifikator Keuangan	2022-07- 01	762/SEK/Kp.I/SK/ VII/2022	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIK AN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Ulul Azmi, S.H. 199606142022031005	Penata Muda III/a	2022-03-01	418/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	Analisis Perkara Peradilan	2022-03- 01	418/SEK/CPNS.0 4.1/SK/II/2022	S-1
119	Anhar Septa Karindra, 198709022006041002	Pengatur Tingkat I II/d	2021-10-01	W29.U/104/KPT/SK /KP.04.1/IX/2021	Pengadministra si Penanganan Perkara	2020-06- 12	W29.U/53/KPT/S K/KP.04.6/VI/202 0	SLTA/SEDE RAJAT
120	Rachmatdani Dlabit Prakoso, 198704252009041001	Pengatur Tingkat I II/d	2021-04-01	W29.U/49/KPT/SK/ KP.04.1/III/2021	Pengadministra si Registrasi Perkara	2020-06- 12	W29.U/53/KPT/S K/KP.04.6/VI/202 0	SLTA/SEDE RAJAT
121	Dawih Ramdani, 197205172014081001	Pengatur II/c	2022-10-01	W29.U/97/KPT/SK/ KP.04.1/X/2022	Pengadministra si Registrasi Perkara	2020-06- 12	W29.U/53/KPT/S K/KP.04.6/VI/202 0	SLTA/SEDE RAJAT
122	Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak. 199904172020122001	Pengatur II/c	2020-12-01	418/SEK/CPNS.04. 1/SK/XII/2020	Pengelola Barang Milik Negara	2022-07- 01	W29.U4/65/KPT/ SK/KP.00.3/VII/20 22	D-III
123	Ziyadatul Ihsan, A.Md. 199208212020121003	Pengatur II/c	2020-12-01	419/SEK/CPNS.04. 1/SK/XII/2020	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	2022-07- 01	W29.U/64/KPT/S K/KP.00.3/VII/202 2	D-III
124	Chintya Arnella Purba, A.Md. 199205252022032011	Pengatur II/c	2022-03-01	417/SEK/CPNS.04. 1/SK/II/2022	Pengelola Perkara	2022-03- 01	417/SEK/CPNS.0 4.1/SK/II/2022	D-III

Berikut rincian komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut:

**Tabel. 11**  
**Komposisi SDM**

<b>KETERANGAN</b>	<b>KOMPOSISI</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>KEPANGKATAN (GOL/RUANG)</b>	Pembina Utama Madya (IV/d)	16
	Pembina Utama Muda (IV/c)	13
	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
	Pembina (IV/a)	13
	Penata Tingkat I (III/d)	38
	Penata (III/c)	16
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	12
	Penata Muda (III/a)	6
	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	5
<b>PENDIDIKAN</b>	S3	2
	S2	50
	S1	54
	D3	5
	SMA	12
	SMP	1

2. Mutasi

Daftar hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang menerima mutasi alih tugas selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 12

## Mutasi Masuk Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus

NO	NAMA	MUTASI MASUK		KETERANGAN
		Jabatan Sebelum Mutasi	Jabatan Setelah Mutasi	
1	Rakhman Rajagukguk, S.H., M Hum. NIP. 196103271992031001	Hakim Pengadilan Negeri Bekasi	Hakim	07/03/2022
2	T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. NIP. 196603011992121001	Hakim Pengadilan Negeri Palembang	Hakim	27/06/2022
3	Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. NIP. 196701211993032002	Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin	Hakim	01/03/2022
4	Wiji Astuti, S.H., M.H. NIP. 196708041986102001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera Pengganti	05/12/2022
5	Khamim Thohari, S.H., M.Hum. NIP. 196712031992121001	Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Cibinong	Wakil Ketua	30/03/2022
6	Wadji Pramono, S.H., M.H. NIP. 196904181996031001	Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Cibinong	Hakim	27/06/2022
7	Masduki, S.H. NIP. 197102011999031001	Ketua Pengadilan Negeri Cibadak	Hakim	27/06/2022
8	Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. NIP. 197102081995031001	Ketua Pengadilan Negeri Selong	Hakim	24/06/2022
9	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. NIP. 197411212000122002	Ketua Pengadilan Negeri Balige	Hakim	13/04/2022
10	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. NIP. 197811091998031002	Sekretaris Pengadilan Agama Semarang	Sekretaris	14/04/2022

11	Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H. NIP. 197811132002031001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang	Panitera Pengganti	23/05/2022
12	Nova Vitrianida, S.H. NIP. 197811262000032001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Panitera Pengganti	14/03/2022
13	Martin Octavianus, S.H., M.H. NIP. 198210252008051001	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tarutung	Panitera Pengganti	14/03/2022
14	Peni Juniska Situngkir, S.H., M.H. NIP. 198504242008052001	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan	Analisis Perkara Peradilan	15/08/2022
15	Dewi Martiani Wulansari, S.H. NIP. 198803312010122002	Analisis Kompetensi Komisi Yudisial	Analisis Tata Laksana Pengadilan	01/09/2022
16	Elfriede, S.E. NIP. 199506132019032010	Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Arga Makmur	Penyusun Laporan Keuangan	25/02/2022

**Tabel. 13**

**Mutasi Keluar Alih Tugas pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus**

NO	NAMA	MUTASI KELUAR		KETERANGAN
		Jabatan Sebelum Mutasi	Jabatan Setelah Mutasi	
1	Mahmuriadin, S.H. NIP. 196303041992121001	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara	16/03/2022

2	H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. NIP. 196606011992121001	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	01/04/2022
3	Ferry Nita, S.H. NIP. 196904011988032001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	28/03/2022
4	Sagitarina Novianty, S.H. NIP. 197511242009122001	Jurus Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang	16/03/2022
5	Wendra Rais, S.H., M.H. NIP. 196506301992121001	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Hakim Tinggi Pengendalian Tinggi Gorontalo	20/12/2022
6	Dian Agustin, S.H. NIP. 198408222009042008	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang	12/12/2022

### 3. PROMOSI

Daftar hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang dipromosikan selama tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel. 14**  
**Promosi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus**

NO	NAMA	PROMOSI		KETERANGAN
		Jabatan Sebelum	Jabatan Setelah	
1	H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. NIP. 196606011992121001	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	01/04/2022
2	Ferry Nita, S.H. NIP. 196904011988032001	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	28/03/2022
3	Wendra Rais, S.H., M.H. NIP. 196506301992121001	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Hakim Tinggi Pengendalian Tinggi Gorontalo	20/12/2022

Selain itu, dapat diinformasikan pula jumlah Sumber Daya Manusia yang memperoleh kenaikan pangkat sebanyak 11 orang dan kenaikan gaji berkala selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebanyak 59 orang.

#### 4. PENSIUN

Daftar pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang pensiun selama tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel. 15**  
**Daftar Pegawai Pensiun pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus**

NO	NAMA/NIP	TMT
1	Dr. Hanry Hengky Suatan, .S.H., M.H. NIP. 195711201988031001	01/12/2022
2	Rini Sumarningsih, S.H., M.M. NIP. 196201061987032001	01/02/2022

3	Adhari NIP. 196203031987021001	01/04/2022
4	Suwarni, S.H., M.H. NIP. 196204081981032001	01/05/2022
5	Mardi Tambunan, S.H. NIP. 196204121984111001	01/05/2022
6	Obertus Kennedy P. Simanjuntak, S.H., M.H. NIP. 196210131994031002	01/11/2022
7	Cecep Munadi NIP. 196402042014081003	01/03/2022

#### 5. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS)

Daftar diklat (SDM Teknis/Non Teknis) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel. 16**  
**Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)**

NO	NAMA dan NIP	NAMA KEGIATAN
1	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Bimbingan Teknis Pembuatan Usulan Uang Persediaan dengan Aplikasi SAKTI dan Pembayaran Penghasilan PPNPN 2022
2	a) Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. NIP. 196705051997031005 Jabatan : Hakim b) Arif Budi Cahyono, S.H. NIP. 197001261996031003 Jabatan : Hakim c) Edy Toto Purba, S.H., M.H. NIP. 197001311996031002 Jabatan : Hakim	- Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

3	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Pelatihan Penyusunan CaLK: "Menghasilkan Laporan keuangan Kementerian/lembaga yang Transparan dan Akuntabel"
4	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Pelatihan <i>e-learning</i> Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelola Keuangan APBN TA 2022
5	Maya Kartika Laksmiwati, S.E. NIP. 199505212020122022 Jabatan : Verifikator Keuangan	- Latsar CPNS
6	Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002 Jabatan : Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan	- Pelatihan <i>e-learning</i> Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
7	Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002 Jabatan : Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan	- Pelatihan <i>e-learning</i> Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2022
8	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- <i>Microlearning</i> PPL Bendahara
9	Ziyadatul Ihsan, A.Md. NIP. 199208212020121003 Jabatan : Pemelihara Sarana Dan Prasarana	- Latsar CPNS
10	Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak. NIP. 199904172020122001 Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara	- Latsar CPNS
11	a) Barita Sinaga, S.H., M.H. NIP. 195811111992121001 Jabatan : Ketua Pengadilan	- Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum

	<p>b) Lucky Rombot Kalalo, S.H. NIP. 196702031992121001 Jabatan : Hakim</p> <p>c) Rustiyono, S.H., M.Hum. NIP. 196703251992121001 Jabatan : Hakim</p> <p>d) Edy Toto Purba, S.H., M.H. NIP. 197001311996031002 Jabatan : Hakim</p> <p>e) Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. NIP. 196705051997031005 Jabatan : Hakim</p> <p>f) Ismail Hidayat, S.H.,M.H. NIP. 197310101999031005 Jabatan : Hakim</p> <p>g) Elly Istianawati, S.H., M.H. NIP. 197112281996032005 Jabatan : Hakim</p> <p>h) Arif Budi Cahyono, S.H. NIP. 197001261996031003 Jabatan : Hakim</p> <p>i) Subchi Eko Putro, S.H., M.H. NIP. 196903201996031002 Jabatan : Hakim</p> <p>j) M. Taufik, S.H., M.H. NIP. 198111102003121002 Jabatan : Panitera Muda Pidana</p> <p>k) Endang Purwaningsih, S.H., M.H. NIP. 196811061988032002 Jabatan : Panitera Muda Perdata</p> <p>l) Marthin Turnip, S.H., M.H. NIP. 198203262001121001 Jabatan : Panitera Muda Hukum</p>	
--	---	--

12	Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. NIP. 196701211993032002 Jabatan : Hakim	- Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum
13	<p>a) Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. NIP. 197309081994032003 Jabatan : Panitera</p> <p>b) Endang Purwaningsih, S.H., M.H. NIP. 196811061988032002 Jabatan : Panitera Muda Perdata</p> <p>c) Eva Ruzana, S.H. NIP. 197308311999032005 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>d) Dini Yuli Rosmawati, S.H. NIP. 197307291999032002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>e) Dian Agustin, S.H. NIP. 198408222009042008 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>f) Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H. NIP. 198208182012122001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>g) Erik Yuswanto, S.H. NIP. 198204262007041001 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan
14	<p>a) Irwan Bayumi, S.H., M.H. NIP: 197012071992031002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>b) Maria Theresia Retno Sekarwati, S.H., M.H. NIP: 196304301993032001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>c) Ikat, S.H., M.H. NIP: 196907051992031004 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan

	<p>d) M. Taufik, S.H., M.H. NIP. 198111102003121002 Jabatan : Panitera Muda Pidana</p> <p>e) Marthin Turnip, S.H., M.H. NIP. 198203262001121001 Jabatan : Panitera Muda Hukum</p> <p>f) Mardi Tambunan, S.H. NIP. 196204121984111001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>g) Hera Amalia Nohara, S.H. NIP. 197010051998032002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>h) Hilman Syahadat, S.T., S.H. NIP. 197506102009041002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>i) Lia Marlia, S.H. NIP. 198203102009042004 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	
15	<p>a) Aida Sarasti, S.H. NIP. 196303131983032001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>b) Anita Rahmawati, S.H. NIP. 197908022002122004 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>c) Ahadi Budiarto, S.H. NIP. 197711272003121004 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>d) Ari Prasetyo, S.H. NIP. 197201221994031004 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>e) Adhari NIP. 196203031987021001 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan
16	<p>a) Obertus K.P. Simanjutak, S.H., M.H. NIP. 196210131994031002</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan

	<p>Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>b) Nunyati, S.H., M.H. NIP. 197510151999042001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>c) Nunyati, S.H., M.H. NIP. 197510151999042001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>d) Puji Sulistaryo, S.H. NIP. 196807061990031006 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>e) Nova Vitrianida, S.H. NIP. 197811262000032001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>f) Minati Indriani, S.H. NIP. 198503252008052001 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	
17	<p>a) Yetti, S.H., M.H. NIP. 196701231992062001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>b) Suwarni, S.H., M.H. NIP. 196204081981032001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>c) Wasiatul Chairy, S.H., M.H. NIP. 197002192001122001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>d) Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H. NIP. 197207221994031002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>e) Zelfi Rahmadiani, S.H. NIP. 197409261999032002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>f) Tuti Wildhani, S.H. NIP. 196508181994032002 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan

	<p>g) Yuris Dhetiawan, S.H., M.H. NIP. 198206042001121001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>h) Tati Doresly Simamora, S.H. NIP. 196510102000032001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>i) Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H. NIP. 198005112002122002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>j) Susmiyati, S.H. NIP. 197007011992032002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>k) Syahrir, S.H., M.H. NIP. 198306122005021001 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	
18	<p>a) Santi Indah Pratiwi, S.H. NIP. 197801232001122002 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>b) Sukiman, S.H. NIP. 196306261985011001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>c) Sri Hartini, S.E., M.H. NIP. 197803292006042001 Jabatan : Panitera Pengganti</p> <p>d) Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H. NIP. 198504182009122007 Jabatan : Panitera Pengganti</p>	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan
19	<p>a) Elly Istianawati, S.H., M.H. NIP. 197112281996032005 Jabatan : Hakim</p> <p>b) Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. NIP. 197309081994032003 Jabatan : Panitera</p>	- Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I

20	Martin Octavianus, S.H., M.H. NIP. 198210252008051001 Jabatan : Panitera Pengganti	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan
21	Ferry Nita, S.H. NIP. 196904011988032001 Jabatan : Panitera Pengganti	- Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan
22	a) M. Taufik, S.H., M.H. NIP. 198111102003121002 Jabatan : Panitera Muda Pidana b) Marthin Turnip, S.H., M.H. NIP. 198203262001121001 Jabatan : Panitera Muda Hukum c) Hilman Syahadat, S.T., S.H. NIP. 197506102009041002 Jabatan : Panitera Pengganti d) Martin Octavianus, S.H., M.H. NIP. 198210252008051001 Jabatan : Panitera Pengganti	- Pelatihan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2022
23	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. NIP. 198209152006042005 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	- Pelatihan Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/ Lembaga
24	a) M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus b) Dhesga Selano Margen, S.H. NIP. 198411252009041004 Jabatan : Pengadministrasi Umum	- Pelatihan Budaya Prima "Improve Your Public Speaking and be a Good Speaker"
25	Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. NIP. 197102081995031001 Jabatan : Hakim	- Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan LXX Tahun Anggaran 2022 kerjasama dengan BPSDM
27	Ulul Azmi, S.H. NIP. 199606142022031005	- LATSAR CPNS

	Jabatan : Analis Perkara Peradilan	
28	Chintya Arnella Purba, A.Md. NIP. 199205252022032011 Jabatan : Pengelola Perkara	- LATSAR CPNS
29	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Angkatan VII Tahun Anggaran 2022
30	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Pelatihan <i>asynchronous</i> mandiri perpajakan belanja pada <i>E-Marketplace</i>
31	Frezi Widianingsih, S.H. NIP. 199203272015032001 Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan	- <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Angkatan VIII Tahun Anggaran 2022
33	Elfriede, S.E. NIP. 199506132019032010 Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan	- <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Angkatan VIII Tahun Anggaran 2022
34	Maya Kartika Laksmiwati, S.E. NIP. 199505212020122022 Jabatan : Verifikator Keuangan	- <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Angkatan VIII Tahun Anggaran 2022
35	Bayu Fitrius Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	- <i>E-Learning</i> Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Angkatan IX Tahun Anggaran 2022
36	a) Barita Sinaga, S.H., M.H. NIP. 195811111992121001 Jabatan : Ketua Pengadilan b) Bestman Simarmata, S.H., NIP. 195810261986121001	- Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Eksekusi pada SIPP

	<p>Jabatan : Hakim</p> <p>c) Edy Toto Purba, S.H., M.H. NIP. 197001311996031002 Jabatan : Hakim</p> <p>d) Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. NIP. 197309081994032003 Jabatan : Panitera</p> <p>e) Endang Purwaningsih, S.H., M.H. NIP. 196811061988032002 Jabatan : Panitera Muda Perdata</p> <p>f) Susi Pristiya A. Jabatan : PPNNP</p> <p>g) Rama Agung Arianto Jabatan : Tenaga Kerja Kontrak</p>	
37	<p>M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus</p>	- <i>E-Learning</i> Perumusan Klasifikasi Rincian Output
38	<p>M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus</p>	- Bimbingan Teknis Pembuatan Gaji PPNNP yang Menerapkan PPNNP Web Tahun 2022
39	<p>a) Dessy Herliani, S.Sos. NIP. 197912122006042002 Jabatan : Kepala Bagian Umum</p> <p>b) Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. NIP. 198209152006042005 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>c) Dewi Martiani Wulansari, S.H. NIP. 198803312010122002 Jabatan : Analis Tata Laksana</p>	- Bimbingan Teknis Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

40	<p>a) Barita Sinaga, S.H., M.H. NIP. 195811111992121001 Jabatan : Ketua Pengadilan</p> <p>b) Khamim Thohari, S.H., M.Hum. NIP. 196712031992121001 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan</p> <p>c) Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. NIP. 197309081994032003 Jabatan : Panitera</p> <p>d) M. Taufik, S.H., M.H. NIP. 198111102003121002 Jabatan : Panitera Muda Pidana</p> <p>e) Rifki Maulana Jabatan : Operator SIPP Pidana</p> <p>f) Firman Syawlana Jabatan : PPNPN</p>	- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Berpadu
41	<p>a) Ayu Anisa Septiningrum, A.Md. NIP. 198409242009042012 Jabatan : Juru Sita Pengganti</p> <p>b) Nasrulloh, S.H. NIP. 197608092009121002 Jabatan : Analis Hukum</p>	- Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Menunjang Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
42	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Pelatihan Program Digital Learning manajemen Keuangan Negara Dasar tahun 2022 – Program Pengantar Manajemen Keuangan Negara
43	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	- Pelatihan Program Digital Learning manajemen Keuangan Negara Dasar tahun 2022 – Program Dasar-Dasar Penyusunan APBN
44	M. Toufan Putra Pratama, S.E. NIP. 198610172009041003 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia,	- Pelatihan Program Digital Learning manajemen Keuangan Negara Dasar tahun 2022 – Program Prinsip-Prinsip

	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus	Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat
45	Endang Purwaningsih, S.H., M.H. NIP. 196811061988032002 Jabatan : Panitera Muda Perdata	- Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera
46	M. Taufik, S.H., M.H. NIP. 198111102003121002 Jabatan : Panitera Muda Pidana	- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembaharuan Register Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum
47	Dessy Herliani, S.Sos. NIP. 197912122006042002 Jabatan : Kepala Bagian Umum	- Pelatihan E-Learning PPK Angkatan XI
48	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. NIP. 197411212000122002 Jabatan : Hakim	- Pelatihan Kapasitas Hakim
49	a) Bayu Fitriani Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan b) Nirmalia Anggraini, S.H. NIP. 198402122009042008 Jabatan : Bendahara c) Diana Wahyuningsih, S.H. NIP. 198905022009042001 Jabatan : Juru Sita Pengganti	- Bimbingan Teknis Pelaporan PNBPN Melalui Aplikasi Monsakti
50	Diniarti Mayaciptani, S.E., M.M. NIP. 198209152006042005 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	- E-Learning Rerumusan Klasifikasi Rincian Output
51	a) Nirmalia Anggraini, S.H. NIP. 198402122009042008 Jabatan : Bendahara b) Frezi Widianingsih, S.H. NIP. 199203272015032001 Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan	- Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Operator GLP



LAW FIRM

LAW

JUSTICE



# BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN,  
SARANA DAN PRASARANA  
DAN TEKNOLOGI  
INFORMASI**

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

##### 1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

##### A. BELANJA PEGAWAI

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 17**

**Rekapitulasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022**

NO.	SATKER	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	SISA(Rp)	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Revisi ke-7 005.01.2.097598/2022	19.831.817.000	19.479.063.834	352.753.166	98.22%

**Tabel. 18**

**Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022**

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.912.417.000	6.863.214.760	99.29%
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.000	92.500	92.62%
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	472.425.000	462.254.066	97.85%

4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	130.985.000	126.654.788	96.69%
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	64.750.000	55.390.000	85.54%
6	511124	Belanja Tunj Fungsional PNS	9.368.090.000	9.137.055.000	97.53%
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.400.661.000	1.399.955.060	99.95%
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	310.701.000	320.313.660	98.35%
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.057.280.000	1.057.254.000	100%
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	99.407.000	56.880.000	57.59%
<b>TOTAL</b>			<b>19.831.817.000</b>	<b>19.479.063.834</b>	<b>98.22%</b>

## B. BELANJA BARANG

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 19**

### Rekapitulasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022

NO.	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Revisi ke 3- 005.01.2.097598/2022	4.392.091.000	4.235.435.633	156.655.367	96.43%

**Tabel. 20**

### Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022 Revisi ke 6-005.01.2.097598/2022

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.371.502.000	1.356.611.204	98.84%
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000.000	4.998.650	99.97%

3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	76.560.000	75.260.000	98.3%
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	145.201.000	133.285.280	91.79%
5	522111	Belanja Langganan Listrik	859.789.000	843.606.853	98.12%
6	522112	Belanja Langganan Telepon	2.700.000	1.855.852	68.74%
7	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	130.050.000	129.988.200	99.95%
8	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	691.454.000	688.003.749	99.5%
9	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	630.015.000	586.562.329	93.1%
10	524111	Belanja Perjalanan Biasa	74.670.000	66.613.135	89.21%
11	523119	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	101.800.000	100.861.000	99.08%
12	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.500.000	2.850.000	63.33%
13	522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	7.000.000	6.985.000	99.79%
14	521241	Belanja non operasional Covid	8.000.000	7.945.000	99.31%
15	524119	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000	2.850.000	63.33%
16	522141	Beban Sewa	253.000.000	206.609.381	81.66%
17	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.600.000	1.600.000	100%
TOTAL			4.392.091.000	4.235.435.633	96.43%

## 2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal dalam DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 21

## Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022

NO.	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Revisi ke 7-05.01.2.097598/2022	605.000.000	604.322.000	678.000	99.89%

## 3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

## A. BELANJA BARANG

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 22

## Rekapitulasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022

NO.	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
1	Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Revisi ke 3-005.03.2.099077/2022	347.320.000	334.402.750	12.917.250	96.28%

Tabel. 23

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022  
DIPA-005.03.2.099077/2022

No.	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	521211	Belanja Bahan	57.750.000	56.401.250	97.66%
2	524113	Belanja Perjalanan Biasa dalam kota	88.800.000	80.475.000	90.62%
3	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	141.040.000	140.999.500	99.97%
4	522131	Posbakum	33.600.000	33.600.000	100%
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	18.020.000	15.702.000	87.14%

TOTAL	347.320.000	334.402.750	96.28%
-------	-------------	-------------	--------

## B. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dalam kurun waktu tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 24**  
**Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**  
**Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022**

No	Kode Akun	Uraian Jenis Pendapatan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	15.640.000
2	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	570.000
3	425233	Pendapatan ongkos perkara	92.480.000
4	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	133.679.500
5	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	238.655.460
<b>TOTAL (Rp)</b>			481.024.960

## B. PENGELOLAAN SARAN DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No. 7 Tangerang diresmikan oleh Bapak Soehendro Hendarsin, S.H sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat pada tanggal 07 Pebruari 1983. Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus berdiri di atas tanah seluas 4.000 M<sup>2</sup> dan bangunan seluas 1.880 M<sup>2</sup>. Pembangunan gedung belakang Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus ditangani oleh kontraktor FA. Chandra Putra, yang selesai pada tahun 2015.

Adapun yang telah kami lakukan untuk menunjang kinerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus antara lain:

## 1. GEDUNG KANTOR

### a. Pengadaan

- Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan gedung.

### b. Pemeliharaan

- Selama tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan pemeliharaan gedung dan halaman kantor dengan nilai sebesar Rp. 688.003.749,- (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);
- Pemeliharaan gedung lainnya dengan nilai sebesar Rp. 100.861.000,- (Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

### b. Penghapusan

Berikut usulan penghapusan BMN berupa gedung bangunan yang disetujui oleh Mahkamah Agung untuk kemudian dilaksanakan prose lelang secara online.

- Lelang bongkaran atap dan rangka atap gedung arsip senilai Rp. 1.050.000,- dan terjual seharga Rp. 5.555.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Lelang Meubelair rusak berat senilai Rp. 5.217.100 dan terjual seharga Rp. 32.199.999 (Tiga Puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

## 2. PRASARANA FASILITAS GEDUNG

### a. Pengadaan

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Tangerang mendapatkan anggaran pengadaan prasarana fasilitas Gedung. Adapun pengadaan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- 1) PC Kepaniteraan, 38 unit, pagu Rp. 494.000.000,-
- 2) Printer, 2 unit, pagu Rp. 9.500.000,-
- 3) Laptop, 1 unit, pagu Rp. 13.000.000,-
- 4) Scanner, 1 unit, pagu Rp. 6.000.000,-
- 5) Sarana disabilitas, 1 unit, pagu Rp. 20.000.000,-
- 6) Meja PC disabilitas, 1 paket, pagu Rp. 4.575.000,-
- 7) Meja Oval, 1 unit, pagu Rp. 8.475.000,-
- 8) Meja kerja, 1 paket, pagu Rp. 8.750.000,-
- 9) Kursi, 8 unit, pagu Rp. 8.200.000,-
- 10) White Board, 1 unit, Rp. 2.000.000,-
- 11) Transfer masuk laptop 5 unit dari Mahkamah Agung

b. Pemeliharaan

Dalam tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 586.398.104,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah)

c. Penghapusan

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan pengusulan penghapusan BMN. Adapun usulan penghapusan BMN berupa peralatan mesin dan meubelair selama tahun 2022, yang ditindaklanjuti sampai dengan lelang online:

- Penghapusan 8 (delapan) unit kendaraan bermotor yang telah terjual melalui lelang online di KPKNL Tangerang tertanggal 31 Mei 2022, telah diinput dalam aplikasi sakti modul asset, sehingga 8 unit tersebut sudah dihapuskan dalam daftar asset PN Tangerang.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus meliputi kendaraan dinas, gedung, alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, dan rumah dinas.

**Tabel. 25**  
**Kendaraan Dinas**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda Empat</b>					
1	Toyota Fortuner	2019	√			B 1032 CQH
2	Toyota Fortuner	2019	√			B 1029 CQH
3	Kijang Inova E	2010	√			B 1921 CQ
4	Kijang Super KF 83 LSX	2003	√			B 7450 CQ
5	Toyota Fortuner	2019	√			B 1036 CQH
6	Toyota Inova E	2009	√			B 1334 CQ
7	Toyota Fortuner	2019	√			B 1034 CQH

<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda Dua</b>					
1	Motor Honda GLM II	1997		√		B 4769 CQ
2	Motor Honda NF125 SD	2005		√		B 5609 CQ
3	Motor Honda GLP III	2005		√		B 5608 CQ

4	Motor Honda NF125	2004		√		B 5523 CQ
5	Motor Honda Vario 125	2021	√			B 3239 CVQ
6	Motor Honda Vario 125	2021	√			B 3243 CVQ
7	Motor Honda Vario 125	2021	√			B 3241 CVQ
8	Motor Honda Vario 125	2021	√			B 3250 CVQ

**Tabel.26**  
**Rumah Dinas**

No	Uraian	Dibangun tahun	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1977	√			Jl. Soleh Ali
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1978	√			Komplek Kehakiman XII
3	Rumah Dinas Hakim	1980	√			
4	Rumah Dinas Hakim	1980	√			
5	Rumah Dinas Hakim	1981	√			
6	Rumah Dinas Hakim	1981	√			
7	Rumah Dinas Hakim	1984	√			
8	Rumah Dinas Hakim	1984	√			
9	Rumah Dinas Hakim	1984	√			Grendeng 82
10	Rumah Dinas Hakim	1984	√			Grendeng 83
11	Rumah Dinas Hakim	1984	√			Hasyim Ashyari
12	Rumah Dinas Hakim	1984	√			Jl. Sunan Hadi
13	Rumah Dinas Hakim	1984	√			Jl. Sunan Hadi
14	Rumah Dinas Hakim	1984		√		Buaran 1
15	Rumah Dinas Panitera	1984		√		Buaran 2
16	Rumah Dinas Sekretaris	1984		√		Buaran 3

Adapun data sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebagai berikut:

**Tabel. 27**  
**Matriks Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	6	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepala Bagian	1	
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
9	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
10	Ruang Organisasi dan Tata laksana	1	
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	
13	Ruang Panitera Pengganti	1	
14	Ruang Jurusita	1	
15	Ruang Tunggu Jaksa	1	
16	Gudang	9	
17	Musholah	3	
18	Ruang Sidang	11	
19	Ruang Arsip	3	
20	Ruang Mediasi/Kaukus	4	
21	Ruang Rapat Aula	1	
22	Pos jaga	2	
23	Loket	8	
24	Ruang Laktasi	1	
25	Ruang Perpustakaan	1	
26	Ruang Posbakum	1	
27	Ruang Tahanan	3	

28	Ruang PTSP	1	
29	Ruang Back Office	1	
30	Ruang Server	1	
31	Ruang Kesehatan	1	
32	Pantry	-	
33	Ruang Merokok	1	
34	Ruang Tamu Terbuka	5	
35	Pojok E-Court	1	
36	Ruang/Meja inzage	1	
37	Ruang Tunggu Anak	1	
38	Ruang wartawan	1	
39	Ruang Barang bukti	-	
40	Lobby	1	

**Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi**

1	Access point		35
2	CCTV		13
3	Faxcsimile		2
4	Infocus		3
5	Laptop/Note book		49
6	PC Unit		218
7	PABX		2
8	Pesawat Telepon		-
9	Printer		94
10	Router		1
11	Scanner		35
12	Server		6
13	Switch		1
14	UPS		10
15	Wireless Access Point		6
16	Mesin ketik		64

Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran merupakan sarana dan meubelair baik yang ada dikantor maupun di rumah dinas. Data sarana dan prasarana fasilitas perkantoran tersebut dapat dilihat secara rinci pada table berikut:

**Tabel. 28**  
**Matriks Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran**

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah
1.	A.C. Split	86
2.	A.C. Window	5
3.	A.C. Central	5
4.	A.C. Portable	3
5.	Amplifier	2
6.	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	6
7.	Alat Pemotong Kertas	-
8.	Alat Pengaman/Sinyal	-
9.	Alat rumah tangga lainnya	25
10.	Alat Perekam Suara (VoicePen)	-
11.	Bangku Panjang Besi/Metal	74
12.	Bangku Panjang Kayu	70
13.	Bingkai foto	-
14.	Brankas	6
15.	Buffet	-
16.	Camera Digital	1
17.	Digital Keyboard Technics/Organ	-
18.	Dispenser	12
19.	Exhause Fan	-
20.	Filing Cabinet Besi	-
21.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	10
22.	Genset	2
23.	Gordyn/Kray	15
24.	Handycam	-
25.	Jam Elektronik	-

26.	Jet Pump	-
27.	Kaca Hias	7
28.	Kasur / Spring bed	1
29.	Kipas Angin	42
30.	Kompor gas (alat dapur)	2
31.	Kursi Besi/Metal	1056
32.	Kursi Kayu	172
33.	Lambang Garuda Pancasila	10
34.	Lambang Instansi	238
35.	Layar Film/Proyektor	-
36.	LCD Monitor	12
37.	Lemari Besi/Metal	143
38.	Lemari Es	-
39.	Lemari Kayu	82
40.	Lensa Kamera	1
41.	Loudspeaker	27
42.	Meja Kerja Besi/Metal	2
43.	Meja Kerja Kayu	469
44.	Meja Komputer	2
45.	Meja makan kayu	8
46.	Meja Rapat	23
47.	Meja Resepsionis	-
48.	Mesin Absensi	7
49.	Mesin Antrian	2
50.	Mesin cuci	2
51.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
52.	Meubelair lainnya	9
53.	Microphone/wireless MIC	1
54.	Mimbar/Podium	1
55.	Mobile File	-
56.	Overhead Projector	-
57.	Palu Sidang	13
58.	Papan Visual/Papan Nama	45

59.	Penyemprot tangan (handsprayer)	-
60.	Pintu Elektrik (akses)	5
61.	Rak Besi	-
62.	Rak Kayu	16
63.	Rak piring alumunium	-
64.	Rambu-rambu	-
65.	Sice	35
66.	Sirine	-
67.	Sound System	14
68.	Tabung Gas	-
69.	Tangki Air	-
70.	Tape Recorder	4
71.	Televisi	37
72.	Tempat tidur kayu	3
73.	Tiang Bendera	66
74.	Tripod Kamera	3
75.	Troli	-
76.	White Board	9
77.	Wireless	-

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

### 1. IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) 9 Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara *online*.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat).

Sebagaimana diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA *E-Court*) yang telah diundangkan per tanggal 04 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha Negara. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung membuat peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengganti Peraturan Nomor 3 tahun 2018 yakni adanya penambahan *E-Litigasi*, dimana akan diharapkan dapat diterapkan di Pengadilan pada awal bulan Februari 2020.

Aplikasi ini sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*). Berdasarkan Perma diatas, maka ditunjukkan beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan *E-Court*, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah total perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang mendaftar melalui *E-Court* adalah sebanyak 2.814 perkara, berikut uraiannya per 31 Desember 2022.

**Tabel 29. Akun E-Court**

No.	Uraian	Jumlah s.d tahun 2022 (akun pengguna)
1.	Jumlah akun pengguna E-Court yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar)	3.463
2.	Jumlah akun yang belum valid	0

Data perkara perdata dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang mendaftar melalui e-court dapat dilihat uraiannya sebagai berikut:

**Tabel 30. Perkara Perdata Melalui E-Court**

No.	Perkara Perdata melalui E-Court pada tahun 2022	Jumlah Perkara
1.	Gugatan	1.360
2.	Bantahan	24
3.	Gugatan Sederhana	79
4.	Permohonan	1.351
<b>Total</b>		<b>2.814</b>

## **2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS**

Modernisasi Manajemen Perkara merupakan salah satu misi yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung pada tahun 2035. Modernisasi manajemen perkara dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pengadilan dalam konteks pemenuhan pelayanan untuk masyarakat. Penerapan SIPP yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus akan menghasilkan perubahan mendasar dalam cara pengadilan bekerja untuk melaksanakan fungsinya.

SIPP merupakan sebuah aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan informasi untuk masyarakat seperti status perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs web maupun pada meja informasi di pengadilan. Bagi aparaturnya pengadilan, SIPP juga bermanfaat terkait pemasukan dan pengolahan data serta pencetakan laporan dan untuk memonitor dan inventarisasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Selain peningkatan kinerja, penerapan SIPP pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus juga berdampak positif pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada meningkatnya kepercayaan kepada lembaga peradilan.

Terkait penerapan SIPP ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran No.559/DJU/Hk.00.7/VI/2012 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pelaksanaan SIPP di Lingkungan Peradilan Umum. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai arahan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk menerapkan SIPP dalam proses manajemen perkara.

Pada saat ini SIPP sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkara sesuai dengan Pola Mahkamah Agung. SIPP diharapkan sudah dapat mendukung pelaksanaan administrasi untuk semua jenis perkara, termasuk jurnal keuangan, dokumen template, dan pelaporan perkara secara elektronik. Berikut ini tabel perangkat keras dan perangkat lunak pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

**Tabel 31**  
**Perangkat keras**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT KERAS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	PC Server	3
2.	PC Desktop	218
3.	Laptop	49
4.	Kamera DSLR	1
5.	Printer	94
6.	Switch 24 Port	1
7.	HUB 16 Port	2
8.	Finger Print	7
9.	Proyektor	3
10.	Mikrotik	1
11.	UPS	10
12.	Kamera Mirrorless	1
13.	Tablet Android	6
14.	Scanner	35

**Tabel 32**  
**Perangkat Lunak**

NO	PERANGKAT LUNAK
1.	Website Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus ( <a href="http://pn-tangerang.go.id">http://pn-tangerang.go.id</a> )
2	CTS (Case Tracking System) / SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus ( <a href="http://www.sipp.pn-tangerang.go.id">www.sipp.pn-tangerang.go.id</a> dan 192.168.80.252/SIPP Lokal)
3	Direktori putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di direktori putusan Mahkamah Agung RI ( <a href="http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tangerang">http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tangerang</a> )
4	Aplikasi Jadwal Sidang (SIPP)
5	Aplikasi SIMPEG BADILUM, KOMDANAS, SAIBA, SIMAK BMN, SIMANTAP, PERSEDIAAN ATK, RKKAL, DIPA, MONEV DJA, MONEV BAPPENAS, SILABI, SIMPONI, GPP, SPM GAJI, SPM, SPP, E-SPT, E-REKON, E-COURT, PTSP, E-BERPADU
6	Aplikasi LINTANG (Layanan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 08111507801)
7	Aplikasi IKM (Index Kepuasan Masyarakat)
8	Aplikasi Eksekusi Online
9	Aplikasi Buku Tamu
10	Aplikasi Persuratan (PTSP) dan Era Terang
11	Aplikasi Si-Cuplis (Sistem Cuti Pegawai Online PN Tangerang)



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### 1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence (ICPE)* merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence (IFCE)*, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilum tahun 2014. Tampak substansi ICPE yang belum familiar hanya ISO, tetapi sebenarnya itu gampang dipelajari.

Pengalaman Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengkonfirmasi bahwa tanpa konsultan, tanpa kemewahan dan tanpa sumbangan pihak lain tapi mampu meraih nilai *excellent*. Sertifikat Akreditasi A. PN Tangerang adalah pengadilan yang gedung kantornya masih dalam tahap pembangunan, yang memiliki keinginan maju selalu terkendala aspek *man, money and material*. Akreditasi akan sulit, bahkan mahal bila malas belajar dan bekerja.

#### **Kriteria penilaian**

Kepemimpinan (*leadership*) memberikan sumbangan besar terhadap kesuksesan akreditasi. Setiap orang adalah pemimpin, tetapi tidak semua orang dapat menjadi pimpinan yang ideal. Sering terjadi pimpinan tidak berfungsi sebagai pengarah/pengendali (*driver*). Akibatnya fungsi sistem tidak optimal sehingga berimbas pada rendahnya kualitas pelayanan.

Nilai audit kepemimpinan maksimal 200 dari total 1000. Penilaian selebihnya dilakukan terhadap perencanaan strategis (*score* 100), fokus pelanggan (*score* 200), sistem dokumen (*score* 100), sumber daya manajemen (*score* 100), proses manajemen (*score* 200) dan *performance result* (*score* 100). Nilai *excellent* didapatkan bila mencapai *score* minimal 700.

Menerapkan akreditasi tidak perlu terjebak istilah-istilah di atas. Aktivitas pengadilan telah meliputi tujuh kriteria akreditasi. Penambahan dokumen hanya terkait manajemen mutu ISO. Selebihnya telah berjalan, tinggal dilengkapi dan disempurnakan.

#### **Langkah Menuju Akreditasi**

Membangun sistem penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerja sama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. PN Tangerang memulainya

sejak Januari 2016 dan diaudit akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM)-Badilum pada Juli 2017.

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di PN Tangerang. Sebagai wujud berbagi pengalaman, maka ini mengelompokkan menjadi sebelas kegiatan. Semua dapat dilakukan berbarengan, tapi langkah keenam hingga kesebelas dilakukan berurutan, yaitu :

*Pertama* pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).

Lebih baik pembinaan dilakukan terjadwal, misalnya di PN Tangerang ditentukan Panmud/Kasub melakukan rapat/pembinaan dua kali dalam satu bulan, panitera dan sekretaris sekali dalam satu bulan, rapat bulanan sekali dalam sebulan. Forum khusus pembinaan KPN terhadap pegawai sekali dalam sebulan dan terhadap hakim sebulan dua kali. Tema pembinaan beragam, misalnya tentang moralitas, visi dan misi, renstra, akreditasi, administrasi, ataupun permasalahan hukum. Tentu selaras *quote* “tuliskan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dituliskan” maka semua kegiatan tersebut terdokumentasi.

*Kedua* pelaksanaan RB. Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan RB. Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim RB. Sesuai Perpres No. 81 Tahun 2000 Tentang Grand Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik.

*Ketiga* pembangunan zona integritas. Mengacu Permenpan No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

*Keempat* pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pengaduan, meja informasi, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan

perempuan, ruang penuntut umum, ruang advokat, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang diversifikasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

*Kelima* pembenahan administrasi. Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari. Misalnya Sema No. 6 Tahun 2014 sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

*Keenam* pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Pada dasarnya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan.

*Ketujuh* pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

*Kedelapan* pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

*Kesembilan* pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

*Kesepuluh* audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM–Badilum, maka harus meminta audit oleh PT. Rekomendasi PT harus segera ditindak lanjuti. Apabila PT menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi TAPM Badilum.

*Kesebelas* audit akreditasi TAPM-Badilum. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Nilai A bila mencapai *score* 700-1000, nilai B *score* 500-699, nilai C *score* 300-499 dan nilai D *score* 0-299.

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan mewujudkan performa peradilan yang unggul (*prima*). Banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, sehingga mempersiapkan akreditasi butuh waktu yang tidak sedikit. Persiapan secara instan mungkin berhasil, tetapi menurut penulis akan gagal merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*).

Pelaksanaan *Surveillance* tahun 2022 dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal **28 Oktober 2022**.



Setelah pelaksanaan *surveillance* tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus melakukan rapat tindak lanjut hasil *surveillance* dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama seluruh komponen pengadilan pada tanggal **31 Oktober 2022** di gedung aula Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.



## 2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan; bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan. Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri,
- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Adapun pembuatan surat keterangan yang sudah menggunakan ERATERANG pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebanyak 825 surat. Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sendiri telah ditetapkan sebagai pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yakni juara III

Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus se-Indonesia sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2474/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022.



Pelaksanaan Evaluasi kinerja PTSP sendiri selalu dilaksanakan setiap hari senin secara berkala, hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dapat berlangsung secara cepat dan optimal. Pada tanggal **11-12 Desember 2022** Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus berhasil mendapatkan penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus di Yogyakarta. Piagam diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H, M.H.



### 3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Mahkamah Agung dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru pembaruan terdapat beberapa Cetak Biru antara lain:

- Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.
- Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan Pilot Project Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2008 maka Mahkamah Agung menerima 70% Tunjangan Kinerja, pada tataran implementasinya Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus. Beberapa program Quick Wins RB / Akselerasi Perubahan yang meliputi Transparansi Putusan Peradilan yaitu:

- a. Pengembangan Teknologi Informasi;
- b. Pengelolaan PNBP;
- c. Kode Etik Hakim;
- d. Manajemen SDM.

Sesuai dengan PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA No.071/KMA/SK/V2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

Terkait Surat Keputusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus membentuk Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W.29.U4/132/UM.02.02/XII/2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas bertanggungjawab untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus baik berupa data, dokumen dan data seluruh warga Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus serta penataan 6 (enam) area perubahan yakni : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Tata Laksana, 3. Penataan SDM Aparatur, 4. Penguatan Pengawasan, 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan pada masing-masing area 1 sampai area 6 yaitu :

a. Manajemen Perubahan

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1085/KP.10.10/9/2022, tertanggal 12 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1297/KP.01.3/10/2022, tertanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/52/KPT/SK/KP.10.10/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022.

b. Penataan Tata Laksana

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1048/KP.10.10/8/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan

Standar Operation Procedure (SOP) Kepaniteraan Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1441/OT.01.3/11/2022, tertanggal 15 Nopember 2022 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/585/TL.01.3/5/2022, tertanggal 19 Mei 2022 tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/243/KP.10.10/2/2022, tertanggal 21 pebruari 2022 tentang Penunjukkan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U/52/KPT/SK/KP.10.10/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Tahun 2022;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1411/OT.01.3/11/2022, tertanggal 10 Nopember 2022 tentang Pemindahan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/276/OT.00/02/2022, tertanggal 22 Februari 2022 Tentang Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

d. Penguatan Akuntabilitas

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/460/KP.10.10/4/2022, tertanggal 14 April 2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Kode Satker 097598;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1422/PS.00/11/2022 tertanggal 10 Nopember 2022 tentang Pembentukan Tim Penerap dan Tim Penilai PIPK pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1646/OT.01.1/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1647/OT.1.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/459/KP.10.10/4/2022, tertanggal 14 April 2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Kode Satker 099077.

e. Penguatan Pengawasan

1. Keputusan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1196/KP.10.10/10/2022, tertanggal 6 Oktober 2022 tentang Tim Pelaksanaan Eksekusi dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1359/PS.00/11/2022 tertanggal 3 Nopember 2022 tentang Pembentukan Satgas SIPP pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1649/PS.00.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Tim Penanganan Laporan/ Pengaduan pada Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor : W29.U4/1384/KP.02.1/11/2022 tertanggal 7 Nopember 2022 tentang Tim Penilai Kinerja Non Pegawai dan Tenaga Kerja Kontrak pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/627/KP.10.10/6/2022, tertanggal 6 Juni 2022 tentang Pemberian Pelayanan Pengadilan negeri Tangerang pada Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/675/KP.10.10/8/2022, tertanggal 9 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Aplikasi Eksekusi Online Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/865/KP.10.10/7/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Tim Pelaksana dan Penilai Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1321/HM.02.1/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penujukan Dewan Pertimbangan, Atasan PPID dan PPID pada Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1441/OT.1.3/11/2022 tanggal 15 Nopember 2022 tentang Struktur pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1423/PS.00/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022 tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Jadwal Briefing pada Petugas Layanan, Kemanan dan Kebersihan pada Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/458/KP.02.1/4/2022, tertanggal 14 April 2022 tentang Tim Penyusunan Survei Persepsi Korupsi dan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka tercetus pemikiran untuk melakukan terobosan atau inovasi dengan mengambil langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus adalah adanya akses pintu yang berbeda antara pegawai dan pengunjung sidang, adanya pintu *metal detector* serta adanya *Flap Barrier* yang terdapat pada akses masuk dan keluar pengadilan. Inovasi lain yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri

Tangerang Kelas 1A Khusus adalah pencaanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. **WBK** sendiri merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Rapat monitoring dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dilaksanakan pada tanggal **15 September 2022** dihadiri oleh Pimpinan dan para pejabat struktural.



Inovasi selanjutnya, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus bertempat di ruang rapat pimpinan bersama vendor mempresentasikan aplikasi Eksekusi Online pada tanggal **28 Juli 2021**.





Untuk mendukung pelayanan kepada disabilitas maka Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus pada tanggal **19 Oktober 2022** melaksanakan Rapat Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dalam rangka menunjang pelayanan bagi penyandang tuna rungu yang digalakkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tangerang. Pelatihan ini diikuti oleh dua orang petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.





**JUDGE**



# BAB VI PENGAWASAN

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menegakkan Disiplin Kerja, dengan tujuan meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan, terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Tangerang yang berdisiplin, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah memperkuat pelaksanaannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/1279/KP.02.1/10/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Disiplin pada Pengadilan Negeri Tangerang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab berupa:

- a. Memantau kedisiplinan Hakim dan Pegawai melalui absensi;
- b. Membuat laporan hasil pemantauan disiplin Hakim dan Pegawai;
- c. Melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang setiap bulannya.

2. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung melalui sarana Rapat koordinasi pada Pengadilan Negeri Tangerang yang dilaksanakan secara berjenjang dan terjadwal. Adapun Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri Tangerang terdiri dari Rapat koordinasi Hakim, seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang tersusun dalam jadwal rapat bulanan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/471/KP.02.1/4./2002 tanggal 14 April 2022 tentang Mekanisme Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.

### 3. Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang

Dalam melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor W.29.U4/456/KP.10.10/4/2022, tertanggal 14 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugasnya setiap bulan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang selaku Koordinator Pengawas yang merangkum hasil pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

**Tabel. 34**

#### **Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus**

<b>No.</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan Internal dalam unit organisasi</b>
1	Khamim Thohari, SH., M.Hum	Koordinator Pengawas, Pengawas PP, JS dan JSP
2	a) Wendra Rais, SH., MH. b) Fathul Mujib, SH, MH c) Wisnu Rahadi, SH., MH. d) Lucky Rombot Kalalo, SH e) Rakhman Rajagukguk, SH., M.Hum f) Bestman Simarmata, SH., MH. g) Edy Toto Purba, SH., MH.	Pengawas Perdata  Pengawas Delegasi Perdata Pengawas Mediasi  Pengawas Eksekusi
3	a) Sih Yulianti, SH. b) Nanik Handayani, SH, MH	Pengawas Pidana
4	a) RR. Endang Dwi H, SH, MH b) Ismail Hidayat, SH, MH c) Lenny M. Napitupulu	Pengawas Hukum  Pengawas Direktori Putusan
5	a) Agus Agus Iskandar, SH., M.H b) Saidin Bagariang, SH. a) Arie Satio Rantjoko, SH., MH.	Pengawas Bidang Tata Usaha dan Keuangan, Pengawas Honoror
6	a) DR. Harry Hengky S., SH., MH. b) Agung Suhendro, SH, MH	Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

7	a) R. Aji Suryo, SH.,MH b) Ferdinand M L, SH., MH	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8	a) Drs Tugiyanto, Bc.Ip, SH., M.H b) Rustiyono, SH., M.Hum	Pengawas PTSP
9	a) Subchi Eko Putro, SH., MH. b) Elly Istianawati, SH., M.H	Pengawas SIPP
10	a) Arif Budi Cahyono, SH., MH.	Humas/Juru Bicara

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, didapatkan hasil terkait informasi dan pengaduan yakni sebanyak 38 jumlah layanan informasi dan 35 jumlah layanan pengaduan yang sifatnya tembusan ke Ketua PN Tangerang.

Dari hasil pengawasan hakim pengawas bidang akan dibahas secara pleno pada rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Tangerang untuk ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi dari Hakim pengawas bidang.

#### 4. Pelaksanaan Briefing pada Petugas Layanan, keamanan dan kebersihan

Untuk meningkatkan kinerja petugas layanan, keamanan dan kebersihan pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka dilaksanakan kegiatan briefing yang intensif terhadap petugas layanan, keamanan dan kebersihan dengan menerbitkan Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/1423/PS.00/11/2022 tanggal 10 Nopember 2022.

Adapun tim briefing dilaksakan oleh Kepala Bagian Umum, Para Panitera Muda dan Kepala Sub. Bagian yang dijawadlkan pada setiap hari Selasa dan Kamis. Sedangkan tugas tim briefing berupa:

- a. Melakukan briefing terhadap petugas layanan, keamanan dan kebersihan;
- b. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- c. Mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

#### 5. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka mempersiapkan organisasi yang baik untuk menghadapi resiko yang kemungkinan terjadi, maka diterbitkanlah Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/1359/PS.00/11/2022 tanggal 3 Nopember 2022 yang

sebelumnya melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/37/KP.10.10/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun tugas tim SPIP adalah Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi resiko, melakukan penilaian resiko, menganalisis resiko, mengevaluasi resiko, memantau resiko dan menindaklanjuti resiko dengan mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

## **B. EVALUASI**

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



# BAB VII PENUTUP & KESIMPULAN



## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah disusun berdasarkan hasil analisis kenyataan secara objektif dengan informasi yang sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sesuai harapan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyusunan laporan kegiatan tahun 2022 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus yang sangat kompleks di lapangan.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Visi misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan **proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan”** sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, SIPP, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual dan berbasis Teknologi Informasi merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal

tersebut berarti perubahan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus di tahun 2022 semakin baik jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai dan barang semakin efektif dan efisien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2022, keseimbangan RKA-KL, pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara *reasonable dan accountable*.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa mendatang.

## B. PENUTUP

Demikian yang dapat kami sajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus kepada masyarakat kami sampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 kepada Pengadilan Tinggi Banten selaku instansi Pembina kami, besar harapan kami dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A khusus tetap kami harapkan sebagai perbaikan dan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Hormat kami

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A  
Khusus



**SARITA SINAGA, SH., MH.**